

NEWSLETTER

Media & Reformasi Sektor Keamanan

:: Indeks ::

Kabar Utama

- Memotret Pergantian Pejabat Tinggi Pertahanan dan Keamanan
- Di Tentara Kepemimpinan Dan Manajemen Itu Beda!

Advokasi

- Reformasi Sektor Keamanan di Tangan Pejabat Baru

Studi

- Bercermin Pada Pergantian Panglima Militer Inggris

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPTS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).

Kotak Kritik dan Saran Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di info@idsps.org atau melalui pos ke alamat sekretariat Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPTS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax: 62.21.7804191

NewsLetter ini dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsps.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNGJAWAB: Mufti Makaarim A., Nezar Patria
EDITOR: Amdy Hamdani
KONTRIBUTOR: Asep Komaruddin, Fitri, Nurika Kurnia, Jojo Raharjo, Amin Mustakim
DISTRIBUSI: Heri Kuswanto

Pergantian Pejabat-Pejabat Strategis dan Komitmen Reformasi

Pengantar

Indonesia sedang melewati masa transisi pergantian pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, termasuk pemimpin sektor hankam setingkat menteri, yakni Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Berjalan atau tidaknya reformasi sektor keamanan Indonesia dipengaruhi oleh apakah para pejabat tinggi ini bersedia untuk mengimplementasikan agenda transparansi dan akuntabilitas, tentu saja dalam koridor yang sesuai bidangnya masing-masing. Yakni Kapolri dalam masalah penegakan hukum dan penjagaan keamanan, Jaksa Agung dalam penuntutan dan Panglima TNI dalam hal pembangunan pertahanan negara. Newsletter kali ini akan menengahkan ketiga bidang secara umum dengan titik utama bidang pertahanan.

Satu diantara sejumlah pejabat-pejabat instansi strategis yang sudah pasti akan segera dilantik oleh Presiden SBY adalah Panglima TNI yang baru yaitu Laksamana Agus Suhartono. Berbeda dengan isu pergantian Kapolri, Ketua KPK dan Jaksa Agung, pengangkatan Laksamana Agus Suhartono tidak diwarnai polemik yang bisa menyudutkan posisi Presiden terutama dikaitkan dengan upaya melanjutkan reformasi di sektor keamanan yang keberhasilannya tidak bisa dilepaskan dari reformasi di sektor lainnya.

Beberapa hal yang memuluskan pengangkatan Laksamana Agus Suhartono antara lain; Pertama, Meskipun Undang-undang tidak mengatur secara rinci, tapi berdasarkan pergiliran mengisi jabatan Panglima TNI, maka jabatan tersebut saat ini diisi oleh figur Angkatan Laut. Kedua, dilihat memiliki kesesuaian rencana pengembangan pertahanan di wilayah laut. Ketiga, DPR sendiri telah mengecek bahwa calon Panglima TNI pilihan Presiden tersebut tidak terlibat pelanggaran HAM dan tindak pidana korupsi.

Adalah hal yang penting bagi Presiden SBY memilih pejabat yang tepat karena pilihannya tersebut berpengaruh secara langsung dengan bisa atau tidaknya diraih berbagai kemajuan yang hendak dicapai. Sebab bila tidak, penuntasan reformasi di sektor keamanan kembali buram.

Berkaca pada pengangkatan Panglima TNI baru hendaknya tidak melupakan hal penting yang juga perlu diselesaikan diluar persoalan alutsista, pasukan dan restruktusisasi lembaga. Organisasi masyarakat sipil misalnya mendesak agar Panglima TNI yang baru memiliki paradigma baru dan komitmen tinggi pada agenda reformasi sektor keamanan dengan melakukan pembenahan akuntabilitas TNI.

Bagi masyarakat sipil terwujudnya sistem keamanan yang berorientasi pada penghargaan dan perlindungan HAM merupakan kebutuhan mendesak. Bagi mereka tidak berjalannya mekanisme akuntabilitas TNI, dan belum ditetapkannya mekanisme vetting dalam akuntabilitas internal TNI merupakan faktor penyebab mengapa reformasi TNI melamban.

Dengan demikian mewujudkan TNI sebagai komponen utama yang tangguh, tidak pernah lepas dari berhasilnya pengambil kebijakan memenuhi mekanisme akuntabilitas TNI. Terpenuhinya mekanisme akuntabilitas teramat penting apalagi soal ini secara umum mengganjal penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia.[]AM

Memotret Pergantian Pejabat Tinggi Pertahanan dan Keamanan

Transisi pejabat-pejabat tinggi sektor pertahanan dan keamanan setingkat menteri, yakni Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung, juga menentukan upaya mendorong RSK di Indonesia.

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Presiden melantik Laks. Agus Suhartono sebagai Panglima TNI baru menggantikan Jend. Djoko Santoso. Seluruh fraksi di DPR mendukung Laks. Agus Suhartono sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden SBY dan Panglima TNI baru diharapkan mampu menuntaskan agenda reformasi TNI secara menyeluruh juga membuat strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum kekuatan militer Indonesia dengan memperhatikan industri pertahanan dalam negeri.

Sejalan dengan harapan tersebut Laks. Agus Suhartono ketika menjalani *fit and proper test* di DPR mengungkapkan bahwa dirinya memastikan akan tetap menjaga agar program reformasi TNI terus berjalan. Meskipun dia mengakui, program reformasi internal TNI masih perlu disempurnakan, diantaranya mengenai bisnis militer, peradilan militer dan pembenahan aspek kultural.

Menurut pengamat militer dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, dalam 10 tahun terakhir Reformasi TNI dan Polri baru pada aspek-aspek legal (hukum), seperti adanya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Namun reformasi belum menyentuh aspek budaya dan tingkah laku anggota TNI dan Polri.

Laks. Agus Suhartono yang merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden SBY ke DPR itu dipandang tidak cacat, "Dewan tidak menemukan laporan permasalahan dari masyarakat tentang calon Panglima TNI" kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Shiddiq.

Proses pengangkatan Panglima TNI baru ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 Ayat 5, yang menyebutkan dalam pergantian Panglima, presiden terlebih dahulu mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prosedur ini ditujukan untuk mempertegas prinsip supremasi sipil dalam pengaturan TNI, dimana

Presiden menjadi otoritas politik sipil yang menunjuk Panglima TNI, bukan kalangan militer sendiri. Sebelumnya, Komisi HAM menggunakan tiga variable untuk menguji Agus. Karir militer, perspektif HAM dan pelanggaran HAM selama dia berdinast. Dan hasilnya, Laks. Agus Suhartono mendapat kesan memiliki pemahaman HAM dalam setiap operasi yang dilakukannya. Dia pun dinilai punya andil besar mencegah masuknya kapal pendukung Timor Leste ketika terjadi konflik pada tahun 1999 tanpa adanya pelanggaran HAM. Selain KPK tidak menemukan calon panglima itu sedang tersangkut kasus pidana korupsi dan taat melaporkan kekayaannya. Pria kelahiran Blitar inipun mendapat dukungan DPR secara bulat.

Pengamat pertahanan dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani, mengakui pilihan Presiden mengangkat Laks. Agus Suhartono menjadi panglima TNI merupakan langkah paling tepat, dilihat dari penyehatan kebutuhan pertahanan nasional yang meliputi kebutuhan keamanan maritim dan perubahan cara pandang terhadap ruang kehidupan yang didominasi oleh perairan.

Alasannya, menurut Jaleswari, pertama sebagai negara kepulauan Indonesia perlu memikirkan keamanan maritim, dengan meningkatkan kekuatan AL dan AU, serta AD sebagai stabilisator. Kedua, dilihat dari takdir geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, perlu mengubah cara pandang terhadap ruang kehidupan yang sebagian besar terdiri dari laut dan perairan.

Namun, langkah tersebut mesti dibarengi dengan perubahan paradigma ancaman, sebab Peraturan Menteri Pertahanan No. PER/ 24/M/XII/2007 masih terlihat peran TNI dalam menangkal masalah keamanan internal, bukan mengatasi ancaman eksternal. Padahal Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 menjelaskan bahwa masalah keamanan dalam negeri (internal) merupakan tugas dan wewenang Kepolisian.

Sementara pengamat militer Kusnanto Anggora melihat pengangkatan Laks. Agus Suhartono sarat muatan politis, antara lain untuk memuluskan kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2014. Pandangan ini muncul dengan melihat daftar mutasi dan promosi di internal TNI yang akan dilakukan bulan depan, dimana untuk posisi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), terdapat nama Pangdam III/

Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar Presiden SBY.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Direktur Program Imparsial, Alia'raf, yang memperkirakan Agus Suhartono akan memasuki usia pensiun pada 2013 mendatang. Setelah Agus, maka penggantinya seharusnya dari AU. Karena AU dianggap tidak memiliki peran politik strategis, maka nama KSAD yang akan diajukan, karena dianggap lebih strategis untuk memberikan dukungan politik. Pada saat itu, posisi KSAD diperkirakan akan dijabat oleh mantan Pangkostrad yang kemungkinannya akan dijabat oleh Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Pekerjaan Rumah TNI

Di luar tekad Agus untuk memelihara reformasi internal TNI. Siapapun yang menjadi Panglima TNI pada dasarnya berkewajiban menuntaskan seluruh proses Reformasi TNI sesegera mungkin dan menjamin ketundukan TNI pada Undang-Undang.

Beberapa agenda reformasi TNI itu diantaranya memastikan seluruh anggota TNI tidak berbisnis, menjaga netralitas dalam Pemilu, tidak berpolitik praktis, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), mendorong pengadilan atas pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, serta melaksanakan UU TNI secara konsisten.

Sampai kini di beberapa tempat pelanggaran hukum oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil masih terus terjadi. Untuk itu Panglima TNI dalam melaksanakan tugasnya kedepan harus bersedia melibatkan masyarakat sipil, terutama dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, mendorong perubahan perilaku dan profesionalitas, serta dalam mengidentifikasi ancaman dan cara mengatasinya.

Terkait dengan efektivitas peran otoritas politik sipil, harus dibangun suatu budaya politik yang menempatkan TNI hanya sebagai alat negara, bukan sebagai bagian dari penentu kebijakan politik pertahanan, apalagi menggantikan peran otoritas politik untuk menentukan arah kebijakan pertahanan.

Menurut Jaleswari Pramodhawardhani dan Mufti Makaarim A, untuk mendukung keberhasilan Reformasi TNI secara menyeluruh, sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain 1). pengentasan korupsi, 2). pengurangan peran TNI dalam penanganan persoalan keamanan domestik seperti separatisme, kekerasan komunal dan bencana alam (Pasal 7 Ayat 2 dalam UU TNI) dengan mengalihkannya kepada institusi keamanan lain, 3). efisiensi penggunaan anggaran

yang terbatas, 4). Pengurangan dan pembenahan struktur Komando Teritorial, serta 5). Pengembangan pemahaman terhadap perubahan geopolitik internasional dan ancaman yang relevan dengan tugas dan wewenang TNI.

Masih Menunggu

Sampai sejauh ini, siapa yang akan diajukan sebagai calon Kapolri dan Jaksa Agung, masih belum jelas. Untuk posisi Kapolri, DPR masih menunggu siapa yang akan diajukan oleh Presiden SBY. Namun, sejumlah media mengabarkan bahwa DPR meminta agar nama calon Kapolri bisa mereka terima awal Oktober ini.

Yang menarik adalah sikap parlemen tampak terpecah menyikapi siapa Kapolri. Sejumlah sumber dari kalangan Partai Demokrat mengakui bial Presiden telah mengantongi satu nama, diluar Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo yang tengah bersaing.

Gabungan Partai Koalisi, yang dipimpin Abu Rizal Bakrie juga belum memutuskan siapa calon tersebut. Namun Partai Golkar berharap cukup satu nama calon yang diajukan Presiden ke DPR. Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR (Golkar) menilai Nanan Sukarna mempunyai ide-ide yang lebih berani untuk meningkatkan kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus. Menurut dia, Imam Sudjarwo memiliki polapikir yang agak konvensional karena telah banyak makan asam garam dalam kesatuan Brimob.

PDIP sendiri lebih banyak mengkritisi soal kenaikan pangkat perwira tinggi Polri menjelang pengangkatan Kapolri baru. Masyarakat sipil, yang juga melakukan berbagai advokasi terkait pencalonan Kapolri lebih menyukai calon yang bisa memenuhi syarat untuk melanjutkan reformasi Polri. Pergantian Kapolri ini merupakan salah satu isu krusial terkait dengan upaya mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan profesionalisme kepolisian.

Sementara rencana pengangkatan Jaksa Agung diwarnai aksi penolakan calon non karir oleh delapan ribuan jaksa. Sebetulnya mereka paham Presiden punya hak prerogative untuk menetapkan calon Jaksa Agung berasal dari jabatan karir. Dalam sejarahnya, dari 27 Jaksa Agung, 22 diantaranya berasal dari non karir.

Yang terpenting dari seorang Jaksa Agung, ialah harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan radikal, memiliki catatan yang baik dalam penegakan hukum serta integritas tinggi. Beberapa kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang sempat tertunda dan tidak jelas penyelesaiannya akan menjadi PR berat bagi jaksa agung terpilih. [JNK/AM]

Di Tentara Kepemimpinan dan Manajemen Itu Beda!

Valeri Ratchev, pensiunan Kolonel AD Bulgaria yang kini menjadi Duta Besar untuk Irak mengatakan, "Di antara semua institusi pemerintah, pertahananlah yang paling bergantung pada kepemimpinan". Seorang pemimpin yang karismatik dan tegas di bidang pertahanan mampu mengatasi berbagai ketidakmampuan manajemen, yang berbeda dengan perusahaan atau departemen pemerintah yang lain.

Di satu sisi, manajemen adalah fungsi yang harus dijalankan secara administratif, seperti membuat rencana; menentukan anggaran; melihat kinerja dan melakukan evaluasi. Sementara kepemimpinan adalah hubungan atasan dengan anak buah yang dapat memberi energi pada organisasi. Sehingga ada kiasan "manajemen bisa dipelajari, tapi kepemimpinan adalah seni yang memerlukan bakat", jadi tak semua orang bisa.

Jejak Panglima TNI dari AL

Sepanjang masa pergantian Panglima TNI semenjak Reformasi 1998 sudah dijabat bergilir oleh setiap angkatan. Urusan kepemimpinan ini bisa bermasalah, giliran tahun ini akan dipegang oleh AL dengan figur Laks. Agus Suhartono yang sebelumnya menjabat sebagai KSAL.

Tidak ada masalah di AL sepanjang kepemimpinan Laks. Suhartono, namun jika dikembalikan ke tubuh angkatan perang Indonesia yang secara keseluruhan masih kental 'selera AD'-nya, mampukah dia mendapatkan dukungan? Perlu diingat dalam kepemimpinan TNI, panglima yang berasal dari angkatan lain sulit untuk bebas bergerak.

Misalnya di era Laks. Widodo A.S. Walau berasal dari AL, sulit baginya untuk menambah satu divisi pasukan marinir, karena tidak mendapat restu dari semua angkatan. Dimasanya terdapat juga kasus korupsi Kostrad melalui Yayasan Dharma Putra senilai Rp 190 milyar. Dia mendapat tekanan untuk memberi *katebelece* dalam penggantian Pangkostrad Letjen. Agus Wirahadikusuma yang ingin membuka siapa saja oknum-oknum petinggi AD pelaku korupsi tersebut.

Gerak Letjen. Agus yang reformis sebetulnya sejalan dengan keinginan Laks. Widodo. Tapi Letjen. Agus kalah bermain di angkatannya, Laks. Widodo pun mencari jalur aman. Walau tak bisa dipungkiri dia ikut mendorong RSK dengan dihapusnya peran sopsol militer melalui keputusannya tentang "Paradigma Baru Peran TNI" yang menegaskan tugas pokok pertahanan tentara.

Panglima TNI yang digilir membuatnya seperti arisan, kritik Ahmad Muzani anggota DPR Komisi I. Atau justru membuat pejabat tinggi militer sibuk menghitung waktu yang tepat untuk naik sebagai kepala staf untuk kemudian meraih jabatan setingkat menteri tersebut, ungkap Fajrul Falaakh ahli tata negara dari UGM.

Menurut Falaakh, jabatan Panglima dihapus saja untuk menghindari perebutan antar angkatan. Tapi, rasa keadilan untuk angkatan selain AD mendapat posisi tertinggi di TNI juga perlu. Dari proporsionalitas jumlah

anggota, AD yang paling punya kans paling besar untuk jadi panglima. Hal ini menunjukkan *positive discrimination* dengan cara rotasi perlu dilakukan.

Poin-Poin Penting Pemimpin

Selain mengakomodasi setiap angkatan, Valeri Ratchev mengungkapkan beberapa poin penting yang harus dilihat dalam menentukan pemimpin tertinggi militer. Yang pertama mampu membangun relasi baik. Ini penting untuk menekan ego antar angkatan dan sebagai pemersatu institusi TNI itu sendiri.

Keahlian seperti ini juga diperlukan dalam berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan, DPR dan Presiden. Sepanjang sejarah, putusan presiden adalah krusial, dimana Presiden Megawati mengirim surat ke DPR untuk menaikkan Jend. Ryamizard Ryacudu, namun seminggu setelah dia turun, SBY menarik surat Megawati dan memperpanjang jabatan Jend. Endriartono Sutarto.

Yang kedua, pemimpin militer mampu memberi petunjuk bagi anggotanya. Hal ini krusial ketika terjadinya konflik, baik untuk memberi semangat sekaligus panglima untuk meredakan emosi prajuritnya sehingga tetap berpegang pada standar operasi dan kode etik, seperti misalnya penghormatan HAM.

Fungsi tentara di bidang pertahanan harus tetap dijaga walau terdapat ajakan untuk melibatkan diri ke bidang lain seperti penanganan kesehatan, olah raga maupun KB. Keterlibatan di sopsol bisa setelah diminta perbantuannya.

Yang ketiga panglima berpegang pada intuisi dan komitmennya. Hal ini membuat seorang pemimpin dihormati karena fungsinya bukan hanya membela pertahanan negara, membuat strategi dan melakukan pengorganisasian; tapi juga mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat lalu memotivasi mereka, serta membangun kepercayaan atas institusinya. Untuk itu panglima sebaiknya mau memberikan informasi kepada media akan operasi dan rencana TNI ke depan, walau mungkin tidak seluruhnya, yang mana hal ini menunjukkan itikad transparansi institusi.

Idealnya, panglima juga bersedia membuka ruang dialog dengan kalangan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan sehingga dapat melakukan operasi dengan baik dan meminimalisir tindak kekerasan, terutama di daerah konflik seperti Papua atau Maluku.

Terakhir, pemimpin militer percaya bahwa institusinya mampu menjadi lebih maju. Panglima yang memiliki kepercayaan tidak perlu takut untuk mendorong agenda RSK yang cenderung melempem, yang seperti yang dikatakan Ikrar Nusa Bhakti "seperti besi dingin, sulit dibentuk kembali". Sehingga upaya-upaya untuk merevisi hubungan dengan Kementerian Pertahanan, merestruktusisasi komando teritorial, dan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu terus berjalan. Apakah Laks. Agus Suhartono akan memenuhi itu semua? Publik memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan mengawasinya. [FBT]

RSK di Tangan Pejabat Baru

Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung baru diharapkan lebih memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjalankan pekerjaannya, terlepas apapun latar belakangnya.

Diantara tiga pejabat setingkat menteri Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung yang akan diganti, hanya Marsekal TNI Agus Suhartono yang melenggang dengan mulus menduduki pos baru sebagai Panglima TNI. Setelah dipecat oleh MK, Jaksa Agung sementara dijabat oleh Wakil Jaksa Agung Darmono yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung. Sementara Presiden SBY hingga saat ini belum mengajukan siapa sosok Kapolri baru.

Untuk calon Panglima TNI baru, kalangan DPR tidak terpecah dan menilai bahwa Presiden telah menetapkan calon yang tepat. Pengajuan Agus Suhartono dipandang memiliki kesesuaian dengan rencana pemerintah membangun pertahanan wilayah laut, yang selama ini bukan prioritas pembangunan pertahanan. Dilihat dari segi ancaman, gangguan keamanan di wilayah laut Indonesia, baik gangguan pelayaran penumpang maupun barang tidak menunjukkan gejala penurunan. Sementara di perbatasan laut tingkat ancaman kedaulatan dari negara tetangga juga makin besar.

Tingkat kejahatan di laut, berupa perompakan, pencurian, penculikan dan gangguan keamanan masih cukup tinggi. Pada tahun 2005 saja, kejahatan di Selat Malaka yang dilintasi 50 ribu kapal pertahun merupakan tercatat paling tinggi di dunia. Angka kerugian negara cukup fantastis, menurut data Bappenas tahun 2007 senilai US\$5,7 Milyar pertahun.

Dari merajalelanya praktik pencurian ikan dan penangkapan ikan ilegal setiap tahun ditaksir lebih dari Rp 30 triliun. Kerugian tersebut masih ditambah dengan potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun. Kerugian dari pencurian ikan ini saja tidak sebanding dengan anggaran pertahanan pertahun. Sementara lemahnya keamanan laut bisa mengundang negara lain untuk turut mengamatkannya.

Karenanya pilihan Presiden untuk mencalonkan Panglima TNI baru yang berasal dari Angkatan Laut dinilai tepat untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman dan gangguan tersebut. Meskipun beberapa anggota

DPR kurang menyetujui kebijakan rotasi jabatan Panglima ini, terlebih karena calon yang diajukan SBY ke parlemen hanya satu.

Khususnya TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, perlu meningkatkan kemampuannya dalam rangka menegakkan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum. Selain mengupayakan perlunya peningkatan koordinasi keamanan maritim antar lembaga-lembaga yang punya fungsi dan peran di wilayah itu.

Hal yang berbeda disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil yang mendesak agar institusi TNI dapat dipimpin oleh figur yang berkomitmen untuk membenahi mekanisme akuntabilitas TNI. Menurut Wakil Koordinator Kontras Endria Fernida, terdapat dua faktor penyebab melambannya proses reformasi TNI. Pertama, inefektivitas mekanisme akuntabilitas TNI, yang ditandai tidak terimplementasinya yurisdiksi pidana kriminal anggota TNI, dari pengadilan militer ke pengadilan sipil yang berpengaruh pada mandeknya pengusutan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI.

Kedua, belum diterapkannya mekanisme vetting dalam akuntabilitas internal TNI. Padahal mekanisme tersebut berdaya guna sebagai suatu proses penilaian integritas dan rekam jejak dalam menentukan layak tidaknya seseorang melanjutkan jabatan atau mereka yang punya prospek dalam jabatan-jabatan publik.

“Semangat mekanisme ini sebenarnya telah ada dalam sejumlah peraturan perundangan kita, hanya belum diterapkan serius” ujarnya. Bila dijalankan dengan baik, mekanisme ini bisa menjadi model akuntabilitas di lingkungan militer.

Yang Penting Profesional

Berbeda dengan pencalonan Panglima TNI, DPR tampaknya sudah terpecah lebih awal, jauh sebelum Presiden mengajukan figur calon Kapolri baru ke

Senayan. Pendukung utama Presiden SBY, yaitu Partai Demokrat menghendaki ada calon lain diluar Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo yang sedang bersaing.

Sementara politisi PDIP Gayus Lumbun mengkritisi kenaikan pangkat perwira kepolisian menjelang pencalonan Kapolri baru. Anggota Komisi III ini mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat tersebut tujuannya untuk mendongkrak perwira tertentu untuk dimajukan sebagai kandidat Kapolri.

Lain lagi dengan politisi Partai Hanura Syarifudin Sudding, yang menyuarakan agar Presiden dan DPR mempertimbangkan senioritas untuk mencapai suasana yang kondusif. Bila mengikuti senioritas di kepolisian, calon Kapolri akan jatuh ke Komjen Nanan Soekarna. Meskipun tidak siapa yang lebih pantas, Golkar yang memimpin Setgab menginginkan calon Kapolri cukup satu.

Menurut Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, pemunculan kandidat Kapolri lebih dari satu rentan terhadap politik dagang sapi di DPR, selain hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di tubuh kepolisian. Dia berharap calon Kapolri pilihan Presiden adalah orang memiliki pengalaman. Sebelumnya, Kompolnas telah memberikan pertimbangan yang akan digunakan oleh Presiden kepada delapan nama calon dari Kapolri yang disaring lembaga ini rekam jejaknya.

Lepas dari kepada siapa jatuh pilihan Presiden. Para pengamat kepolisian bersepakat bahwa Kapolri yang baru harus sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap agenda reformasi Polri. Bambang Widodo Umar, Guru Besar Ilmu Kepolisian UI bahkan menilai Kapolri baru perlu diberi kontrak kerja yang jelas, kontrak ini menurut dia merinci apa program yang akan dilaksanakan Kapolri ke depan.

Bila diterima, maka ini merupakan hal baru bagi DPR, dan menurut Bambang Widodo Umar, DPR juga harus mengevaluasi kontrak kerja tersebut setiap tiga atau enam bulan, guna melihat perkembangan kinerja Kapolri. Pembuatan kontrak kerja bagi Kapolri terpilih ini bertujuan agar masyarakat memiliki pegangan terhadap kinerja korps Polri dan untuk perubahan organisasi kepolisian demi memulihkan kepercayaan masyarakat.

Dari catatan KontraS, kepercayaan publik kepada institusi kepolisian meluntur sejak mencuatnya berbagai kasus satu tahun terakhir seperti penahanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra); kontroversi penahanan Komjen Susno Duadji;

dugaan rekening gendut pejabat di tubuh Kepolisian; penganiyaan aktivis ICW; proses penangkapan dan penahan pelaku terorisme yang cenderung melanggar HAM; belum lagi rekayasa kasus dan tindakan penyiksaan dalam proses penyidikan; juga pembiaran terhadap kelompok-kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama dan ideologi yang tidak tertangani dengan baik.

Kalangan masyarakat sipil sendiri menghendaki pengambil kebijakan bisa mencari sosok calon Kapolri yang profesional sesuai dengan harapan publik, yang dipandang bisa mendorong agenda reformasi sektor keamanan, yaitu sosok yang bisa memenuhi kriteria akuntabilitas, legitimasi, kepercayaan dan memiliki integritas.

Adapun rencana pergantian Jaksa Agung diwarnai kehebohan saat 8.479 jaksa mendesak agar Jaksa Agung yang baru berasal dari kalangan internal kejaksaan, meski mereka sadar presiden memiliki hak prerogatif penuh dalam memilih orangnya.

Perlawanan para jaksa itu bahkan seperti menjadi sikap resmi institusi Jaksa Agung, terlihat dari Siaran Pers di situs www.kejaksaan.go.id. Dalam pernyataan pers yang ditandatangani Kejaksaan Agung Babul Khoir dimuat bahwa calon Jaksa Agung sebaiknya dari dalam atau internal Kejaksaan yaitu Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atau para Jaksa Agung Muda.

Babul Khoir beralasan, Jaksa Agung yang berasal dari dalam atau internal Kejaksaan jelas telah memiliki integritas moral yang baik, profesional, berani melakukan penertiban di internal Kejaksaan dan telah memenuhi kriteria yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Padahal kalangan pengamat banyak berpendapat institusi belum tersentuh reformasi.

Pengamat hukum tata negara Saldi Isra menilai sikap para jaksa tersebut tak ubahnya seperti perilaku politisi, yang resisten dengan terhadap calon dari luar. Presiden SBY tampak berdiam diri menghadapi resistensi tersebut, meskipun dia membuka luas kemungkinan Jaksa Agung baru bukan dari internal kejaksaan.

Menanggapi resistensi ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana mengatakan Jaksa Agung bisa dari kalangan karir atau non-karir. "Yang kita pastikan pilih jaksa agung itu yang non-kasir," tegasnya. Maksud non-kasir, lanjut Denny, adalah jangan sampai memilih Jaksa Agung yang biasa menerima suap dalam bentuk apa pun. "Karena kasir kan tugasnya hanya menerima pembayaran saja. Jadi jangan sampai yang dipilih adalah Jaksa Agung seperti itu," ujarnya. [JR]

Berkaca Pada Pergantian Panglima Militer Inggris

Juli silam, Inggris mengganti Panglima Angkatan Perangnya dari Marsekal Jock Stirrup (AU) ke Jend. David Richards (AD). Pergantian ini berjalan mulus karena panglima militer Inggris yang terdahulu dianggap 'lembek' dalam memperjuangkan angkatan bersenjata ke kementerian.

Stirrup dikritik tidak mampu memberi perlengkapan dan perlindungan yang pantas untuk pasukan Inggris di Afganistan dari bahan peledak modifikasi. Juga tidak bisa membuat keputusan bagaimana bentuk dan ukuran angkatan laut, darat dan udara Inggris ditengah badai krisis ekonomi. Karenanya suksesi panglima militer dianggap penting sebab akan menentukan kekuatan bersenjata, juga politik pertahanan Inggris di luar negeri.

Sosok Panglima Baru David Richards

Jend. Richards (58 tahun) mendapat pamor ketika dia sukses menjalankan tugasnya di Sierra Leone untuk mengevakuasi warga negara Inggris dan pendatang lainnya. Richards dan pasukannya juga memilih untuk tinggal dan membantu melawan pemberontak daripada pergi mengamankan diri. Beruntung pilihannya juga didukung oleh Inggris.

Kemudian dia ditugaskan di Afganistan pada tahun 2006-2007 sebagai komandan NATO. Disana dia menjadi jenderal Inggris pertama yang memberi komando pada pasukan AS di teater perang. David Richards tidak takut untuk membahas masalah yang dianggap sensitif, yakni tentang masa depan angkatan bersenjata Inggris.

"Kita tidak bisa beroperasi seperti sepuluh tahun lalu ketika doktrin ketiga angkatan masih didominasi oleh tank, pesawat jet dan armada pengawal," ujarnya. Menurut dia, ikon hari ini adalah tim berteknologi canggih, peralatan penjinak bahan peledak yang dimodifikasi, dominasi informasi, anti pembajakan, serta serangan dan pertahanan *cyber*.

Richards yang terbiasa melihat peta geopolitik melihat kemungkinan Cina dan Rusia akan melakukan taktik non-konvensional di masa depan. Prediksinya adalah "serangan dilakukan semi-tertutup melalui medium *cyber*, atau dengan gerilya dan cara-cara Hisbullah".

Sepak Terjang dan Prediksi ke Depan

Dengan kondite penugasan internasional yang panjang Jend. Richards, melihat upaya diplomasi pertahanan Inggris ke luar negeri akan tetap besar. Meski caranya bukan dengan mengirim pasukan tempur. Dia lebih

menyukai agar para politikus melakukan dialog dengan separatis, misalnya Taliban, sehingga peran Inggris menonjol sebagai mediator, bukan sekadar pembantu invasi AS.

Tahun ini merupakan pertama kalinya Inggris melakukan *review* kemampuan dan prioritas pertahanan semenjak tahun 1998. Inggris ingin menghemat hingga £9 milyar sekitar £40 milyar anggaran pertahannya per tahun. Review ini juga dipicu oleh permintaan AS agar Inggris meningkatkan sistem persenjataan nuklir Trident yang memerlukan biaya sekitar £20 sampai £34 milyar, yang tidak terlalu disetujui Jend. Richard.

Walau pendapatnya disampaikan cukup kuat namun beliau tetap pada posisi Kepala Angkatan Perang yang tidak terjun langsung ke politik. Jend. Richards menyampaikan saran-saran ke pembuat keputusan dan masukkannya yang rasional mampu mempengaruhi pemerintah Inggris.

Menteri Pertahanan Liam Fox sudah setuju untuk melakukan pemotongan anggaran pertahanan pada sektor yang tidak perlu terutama di bidang pembelian persenjataan, antara lain pembangunan armada dengan menyesuaikan pada standar AS. Hanya saja debat mengenai nuklir belumlah final.

Selain itu karena krisis ekonomi yang belum usai, hadir juga usulan untuk mengurangi jumlah personil pertahanan sekitar 25%. Dimana sekitar 30.000 personil akan dikurangi dari 175.000 personil yang kini dimiliki Inggris. "Jend. Richards adalah pemimpin yang baik dan kuat" ungkap Fox. Sehingga angkatan perang juga mau melakukan perampingan.

Tantangan bagi Jend. Richards saat ini adalah menyeimbangkan antara sarannya bisa diterima oleh pengambil keputusan politik, namun tidak membuat kecewa angkatan perang. Bagaimanapun suatu hal yang sulit untuk mempertahankan kualitas tempur dengan anggaran yang menurun. Namun beliau membuat solusi dengan meningkatkan dialog.

Richard juga terbuka pada bawahan dan masyarakat sipil. Ia bersedia untuk turun langsung bertemu dengan prajurit, jurnalis, pekerja kemanusiaan dan aktivis. Karena itu jika mereka ingin menyampaikan saran kepada pemerintah, masyarakat sipil turut berbicara pada panglima tentara untuk membantu meloby. Jend. Richards dikenal terbuka dan berani dalam memberi dan menerima kritik, suatu hal yang belum biasa dilakukan dalam politik Indonesia yang lebih mendahulukan kedekatan personal dan kesopanan.[]
FBT

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia
Telp. +62 21-7193711; 71791358; 91261736
Fax. +62 21-71791358
E-mail. info@fes.or.id
Website. <http://www.fes.or.id>



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah sebuah organisasi yang mewakili para jurnalis profesional di Indonesia. Organisasi di tingkat nasional bernama AJI Indonesia, sedangkan AJI Kota merepresentasikan anggota AJI di 26 kota di seluruh Indonesia.

AJI memiliki kepedulian besar terhadap isu kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Referensi

- Valeri Ratchev, "Governance, Management, Command, Leadership: Setting the Context", dalam Hari Bucur-Marcu dkk, *Defense Management: An Introduction*, (Jenewa: 2009), hlm. 33.
- Michale Maccoby, "Understanding the Difference between Management and Leadership", *Research Technology Management* 43, No. 1 (Januari-Februari 2000), hlm 57-59.
- Fajrul Falaakh, "Presiden dan Rotasi Panglima TNI", *Kompas*, 30 Oktober 2004
- Gavin Cordon, "Richards is new Chief of Defense Staff", *The Independent*, 15 Juli 2010.
- Richard N Taylor, "General Sir David Richards Appointed Chief of Defence Staff", *The Guardian*. 15 Juli 2010.
- United Kingdom Central Government and Local Authority Spending Fiscal Year 2010", http://www.ukpublicspending.co.uk/uk_defence_spending_30.html
- "Q&A: Trident Replacement", *BBC News*, 30 Juli 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/4805768.stm>
- Caroline Wyatt, "Profile: General Sir David Richard", *BBC News*, 14 Juli 2010, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-10639266>
- "Perubahan Doktrin TNI", *Release IDSPS*, Januari 2007, http://idsps.org/option.com_docman/task_doc_download/gid,103/Itemid,15/
- "Bukan Arisan, Jabatan Panglima Jangan Digilir", *Rakyat Merdeka*, 8 September 2010

Muara dari komitmen tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, Aji berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan-jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme-plus kepatuhan pada etika-tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Bagi AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen, Jakarta 10420
Tel. +62 21 315 12 14
Fax. +62 21 315 12 61
Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com; sekretariat@ajiindonesia.org
Website: www.ajiindonesia.org



Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagi stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32 Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesia
Telp. +61 21-7804191
Fax. +61 21-7804191
Email. info@idsps.org/ idsps_indo@yahoo.com
Website. <http://www.idsps.org>